

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pasifik Selatan merupakan sebuah kawasan yang berada di Samudera Pasifik di mana negara-negara di kawasan tersebut tergolong sebagai negara kepulauan yang memiliki wilayah teritori yang kecil. Setelah beberapa dekade dijuluki sebagai *'the arc of instability'* yaitu kawasan dengan tingkat keamanan yang rendah, saat ini kawasan Pasifik Selatan dijuluki sebagai *'the arc of opportunity'* yaitu kawasan dengan potensial tinggi untuk menyebarkan kekuasaan dan pengaruh bagi negara-negara lain.<sup>1</sup> Salah satunya Tiongkok yang menjadikan kawasan ini sebagai *grand strategy* yang tujuannya selain digunakan untuk menyaingi dominasi Amerika Serikat dan sekutunya, tapi juga digunakan untuk mengamankan kepentingan nasional Tiongkok yaitu mengambil kekuatan diplomatik Taiwan.<sup>2</sup> Taiwan dan Tiongkok menjadi aktor penting di Pasifik Selatan disebabkan kapasitas kawasan ini dalam memberikan dukungan diplomatik yang sampai saat ini masih menjadi rebutan bagi kedua negara tersebut.<sup>3</sup>

Sebelumnya, terdapat 17 negara di dunia yang memiliki hubungan diplomatik penuh dengan Taiwan, enam di antaranya adalah negara-negara kepulauan Pasifik Selatan, seperti Kepulauan Solomon, Palau, Nauru, Kiribati, Tuvalu dan Kepulauan

---

<sup>1</sup> Erdina Putri Amalia, "Penguatan Komitmen Disaster Diplomacy Australia Di Tuvalu Sebagai Upaya Penyeimbang Terhadap Kehadiran China Di Kawasan Pasifik Selatan." (Universitas Muhammadiyah Malang, 2021), <https://eprints.umm.ac.id/59708/>.

<sup>2</sup> Ragawi Numadi Katong, "The Southern Anchor Signifikansi Pasifik Selatan dalam Proyeksi Kekuatan Maritim Global Tiongkok Era Xi Jinping" (Universitas Airlangga, 2021), <https://repository.unair.ac.id/105540/>.

<sup>3</sup> Jian Yang, "China in the South Pacific: Hegemon on the Horizon?," *Pacific Review* 22, no. 2 (2009): 139–58, <https://doi.org/10.1080/09512740902815292>.

Marshall.<sup>4</sup> Dari enam negara tersebut, Kepulauan Solomon adalah negara terbesar yang sudah memberikan dukungannya sejak tahun 1983.<sup>5</sup> Disebabkan hal tersebut tidak heran jika Kepulauan Solomon menjadi salah satu negara target oleh Tiongkok untuk mendapatkan dukungan diplomatiknya.

Keinginan Tiongkok untuk mendapatkan dukungan Kepulauan Solomon bahkan sudah terlihat sejak awal Kepulauan Solomon menjalin hubungan dengan Taiwan. Pada saat Kepulauan Solomon resmi menjalin hubungan diplomatik dengan Taiwan pada tahun 1983, Tiongkok langsung melakukan upaya untuk membatalkan kerjasama kedua negara tersebut dengan mengirim duta besarnya yaitu Hu Hongfan ke Honiara untuk melakukan negosiasi agar Kepulauan Solomon membatalkan kerja sama dengan Taiwan.<sup>6</sup> Namun Perdana Menteri Kepulauan Solomon menolak dengan alasan tidak menginginkan kerja sama dengan komunisme.<sup>7</sup>

Kemudian, pada tahun 2000 hubungan Taiwan dan Kepulauan Solomon sempat renggang dikarenakan Taiwan sempat menolak bantuan yang diajukan Kepulauan Solomon sebesar US\$40 juta, yang mengakibatkan menteri luar negeri Kepulauan Solomon yang seharusnya melakukan perjalanan untuk membuka kedutaan baru di Taipei malah bertemu dengan pejabat Tiongkok di Hong Kong.<sup>8</sup> Namun Tiongkok

---

<sup>4</sup> Jonathan Manthrope, "China Targeting Pacific Isles for Strategic Bases - Asia Times, June 8, 2019" accessed December 4, 2021, <https://asiatimes.com/2019/06/china-targeting-pacific-isles-for-strategic-bases/>.

<sup>5</sup> Denghua Zhang, "Perceiving China's Influence in the Pacific: The Case of Solomon Islands – The Diplomat," 2019, <https://thediplomat.com/2019/10/perceiving-chinas-influence-in-the-pacific-the-case-of-solomon-islands/>.

<sup>6</sup> Tarcisius Tara Kabutaulaka, *Milking the Dragon in Solomon Islands, China in Oceania: Reshaping the Pacific?* (New York: Berghahn Books, 2010).138-139

<sup>7</sup> Kabutaulaka.140

<sup>8</sup> Joel Atkinson, "China-Taiwan Diplomatic Competition and the Pacific Islands," *Pacific Review* 23, no. 4 (2010): 407–27, <https://doi.org/10.1080/09512748.2010.495998>.

juga belum mampu memberikan bantuan yang diinginkan oleh Kepulauan Solomon, sehingga membuat upaya peralihan yang hampir saja terjadi antara kedua negara kembali gagal dilakukan.<sup>9</sup>

Keinginan Tiongkok untuk mendapatkan dukungan diplomatik Kepulauan Solomon sepertinya cukup besar. Setelah satu tahun Kepulauan Solomon membuka kantor kedutaan di Taiwan tepatnya pada tahun 2006, Tiongkok mencoba menawarkan bantuan berupa sejumlah dana untuk Kepulauan Solomon melalui politisi Kepulauan Solomon yaitu Francis Billy Hilly dengan syarat menandatangani nota kesepahaman yang memutuskan hubungan dengan Taiwan dan mengakui Tiongkok.<sup>10</sup> Namun upaya tersebut gagal dilakukan karena Hilly tidak kunjung menandatangani nota kesepahaman tersebut. Kepulauan Solomon akhirnya tetap pada pilihannya untuk mendukung Taiwan. Selama Kerjasama dengan Taiwan berlangsung Kepulauan Solomon telah menerima bantuan yang cukup banyak dengan total US\$460 juta diberbagai sektor kehidupan Kepulauan Solomon seperti sektor pertanian, pendidikan dan kesehatan.<sup>11</sup>

Walaupun Taiwan sudah terlibat hampir di setiap aspek kehidupan Kepulauan Solomon, namun keinginan Tiongkok untuk mendapatkan dukungan diplomatik Kepulauan Solomon nampaknya belum berakhir. Pada tahun 2014 upaya Tiongkok untuk mendapatkan dukungan kepulauan Solomon mulai mendapatkan titik terang.

---

<sup>9</sup> Atkinson, *China-Taiwan Diplomatic Competition and the Pacific Islands*.415

<sup>10</sup> Atkinson, *China-Taiwan Diplomatic Competition and the Pacific Islands*.415

<sup>11</sup> Adinda Normala Putri, "Persaingan Pengaruh Di Pasifik Selatan: Pengalihan Dukungan Diplomatik Kepulauan Solomon Dari Taiwan Ke Tiongkok," *Jurnal Asia Pacific Studies* 3, no. 2 (2020): 130–44, <https://doi.org/10.33541/japs.v3i2.1294>.

Hal tersebut dibuktikan dengan pernyataan Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare, mengisyaratkan kemungkinan peralihan hubungan diplomatik ke Tiongkok yang didasarkan pada pertimbangan bahwa telah meningkatnya ikatan ekonomi Kepulauan Solomon dengan Tiongkok.<sup>12</sup> Hal tersebut tentu saja dapat menjadi ancaman bagi status diplomatik Taiwan di badan PBB.

Melihat adanya upaya peralihan dukungan diplomatik tersebut, Taiwan kembali berupaya meningkatkan hubungan diplomatiknya dengan Kepulauan Solomon. Hal tersebut dapat dilihat dari bantuan ekonomi yang diberikan Taiwan kepada Kepulauan Solomon pada tahun 2017 sebesar US\$29,3 juta untuk pembangunan pedesaan di Kepulauan Solomon dengan imbalan dukungan diplomatik terhadap Taiwan di badan-badan PBB.<sup>13</sup> Namun sepertinya bantuan yang diberikan Taiwan pada tahun 2017, tidak berhasil mempertahankan dukungan diplomatik Kepulauan Solomon. Berselang dua tahun kemudian, upaya Tiongkok untuk mendapatkan dukungan Kepulauan Solomon mencapai keberhasilannya. Hal tersebut, dibuktikan melalui pernyataan Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare, pada 1 Oktober 2019 melalui kunjungannya ke Beijing saat peringatan ke-70 tahun berdirinya RRT (Republik Rakyat Tiongkok) dengan mengatakan bahwa *“we believe that by establishing diplomatic tie with PRC can assist the country achieve some of its development aspirations”*.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Putri, *Persaingan Pengaruh Di Pasifik Selatan: Pengalihan Dukungan Diplomatik Kepulauan Solomon Dari Taiwan Ke Tiongkok*. 131

<sup>13</sup> Putri, *Persaingan Pengaruh Di Pasifik Selatan: Pengalihan Dukungan Diplomatik Kepulauan Solomon Dari Taiwan Ke Tiongkok*. 131

<sup>14</sup> Zhang, “Perceiving China’s Influence in the Pacific: The Case of Solomon Islands – The Diplomat.”

Melalui pernyataan tersebut peralihan hubungan diplomatik Kepulauan Solomon dari Taiwan kepada Tiongkok secara resmi dimulai. Perdana Menteri Sogavare juga menyampaikan bahwa peralihan dukungan diplomatik yang dilakukan Kepulauan Solomon diputuskan berdasarkan suara yang ditentukan oleh kabinet Kepulauan Solomon dengan perolehan 27 suara memilih untuk setuju dan 6 suara abstain.<sup>15</sup> Hal ini tentu saja membuat kekecewaan mendalam dari Taiwan sehingga langsung menarik duta besarnya yang berada di Kepulauan Solomon.<sup>16</sup>

Setelah Kepulauan Solomon mengalihkan dukungannya ke Tiongkok, kedua negara sepakat membuka kantor kedutaan besar di masing-masing ibukota negara.<sup>17</sup> Di samping itu Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, saat peresmian kantor kedutaan besar Tiongkok di Kepulauan Solomon menyatakan bahwa Tiongkok bersama dengan Kepulauan Solomon akan terus memperluas kerjasama pragmatis menyeluruh kedua negara.<sup>18</sup>

Keberhasilan Tiongkok yang sebelumnya sempat gagal mendapatkan dukungan diplomatik Kepulauan Solomon menjadi sinyal berkembangnya pengaruh Tiongkok di Pasifik Selatan, khususnya dalam mendegradasi kekuatan diplomatik Taiwan. Tentu hal ini memantapkan kebijakan Tiongkok terkait *One China Policy* di

---

<sup>15</sup> “Solomon Islands Switches Recognition from Taiwan to China | News | DW | 17.09.2019,” diakses November 27, 2021, <https://www.dw.com/en/solomon-islands-switches-recognition-from-taiwan-to-china/a-50453667>.

<sup>16</sup> “Taiwan Memutus Hubungan Diplomatik Dengan Kepulauan Solomon : Taiwan Today,” diakses November 27, 2021, <https://id.taiwantoday.tw/news.php?unit=463&post=162228>.

<sup>17</sup> Putri, “Persaingan Pengaruh Di Pasifik Selatan: Pengalihan Dukungan Diplomatik Kepulauan Solomon Dari Taiwan Ke Tiongkok.”139

<sup>18</sup> “Wang Yi Sampaikan Ucapan Selatan Atas Pembukaan Kedutaan Besar Tiongkok Di Kepulauan Solomon-CRI,” diakses November 27, 2021, <http://indonesian.cri.cn/20200921/2ee4367c-6a7f-c223-86a3-54d764be245c.html>.

kawasan tersebut. Maka dari itulah penting untuk dikaji mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan Tiongkok dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri Kepulauan Solomon sehingga beralih dari Taiwan ke Tiongkok.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Peralihan dukungan diplomatik yang dilakukan Kepulauan Solomon terhadap Tiongkok menjadi sinyal berkembangnya pengaruh Tiongkok di Pasifik Selatan khususnya dalam mendegradasi kekuatan diplomatik Taiwan. Selain disebabkan hubungan yang terjalin antara Taiwan dan Kepulauan Solomon sudah cukup lama yaitu 36 tahun, Kepulauan Solomon juga merupakan negara terbesar dari enam negara yang memberikan dukungannya pada Taiwan di Pasifik Selatan. Sejak tahun 1983 hingga 2006 Tiongkok gagal mendapatkan dukungan diplomatik Kepulauan Solomon, akhirnya tepat pada peringatan ke-70 tahun berdirinya RRT (Republik Rakyat Tiongkok) tanggal 1 Oktober 2019 Tiongkok berhasil mendapatkan dukungan diplomatik Kepulauan Solomon yang ditandai dengan penarikan duta besar Taiwan dari Kepulauan Solomon. Keputusan tersebut didasarkan pada hasil pemilihan yang dilakukan oleh kabinet Kepulauan Solomon dengan 27 suara setuju dan 6 suara abstain. Berdasarkan fakta tersebut menarik untuk dikaji mengenai upaya yang dilakukan Tiongkok untuk mengubah dukungan diplomatik Kepulauan Solomon. Mengingat hubungan yang dijalin antara Taiwan dan Kepulauan Solomon sudah terjalin cukup lama.

### 1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas pertanyaan penelitian yang ingin diteliti yaitu bagaimana upaya yang dilakukan Tiongkok untuk mengubah dukungan diplomatik Kepulauan Solomon sehingga beralih dari Taiwan ke Tiongkok.

### 1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan Tiongkok untuk mengubah dukungan diplomatik Kepulauan Solomon sehingga beralih dari Taiwan ke Tiongkok.

### 1.5 Manfaat Penelitian

- a. Secara akademik penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran terkait upaya yang dilakukan Tiongkok untuk mengubah dukungan diplomatik Kepulauan Solomon sehingga beralih dari Taiwan ke Tiongkok.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber tambahan referensi terkait permasalahan yang sama dan dapat menjadi acuan dalam melihat upaya negara besar dalam memanfaatkan sumber daya ekonominya.

### 1.6 Studi Pustaka

Dalam menganalisis penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa referensi berupa literatur ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Referensi tersebut akan menjadi landasan bagi peneliti dalam mengembangkan ruang lingkup penelitian.

Tulisan pertama adalah artikel jurnal yang ditulis oleh John Henderson dengan judul *“China, Taiwan and The Changing Strategic Significance of Oceania”* dalam

jurnal *Revue Juridique Polynésienne*.<sup>19</sup> Tulisan ini berkontribusi terhadap penelitian yang dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang telah berperan dalam menentukan dukungan Pulau Pasifik untuk Tiongkok atau Taiwan. Faktor-faktor ini termasuk pertimbangan ekonomi, politik dalam negeri, preferensi pribadi pembuat keputusan utama, dan tekanan eksternal. Artikel ini juga membahas tentang implikasi persaingan negara-negara Kepulauan Pasifik untuk pengakuan diplomatik antara Taiwan dan Tiongkok.

Taiwan telah menginvestasikan banyak uang dan waktu untuk mengamankan Kepulauan Solomon sebagai salah satu dari sedikit negara yang memberinya pengakuan diplomatik penuh.<sup>20</sup> Selain itu artikel ini memiliki perbedaan terhadap penelitian yang penulis lakukan diantaranya artikel ini berfokus pembahasan bagaimana peningkatan kepentingan diplomatik, ekonomi dan strategis yang ditunjukkan Tiongkok di kawasan Pasifik Selatan. Tiongkok melihat dirinya sebagai kekuatan besar yang muncul, dan mengharapkan penghormatan serta pengaruh yang ditimbulkan dari status tersebut. Sedangkan penulis berfokus kepada strategi Tiongkok dalam mengubah kebijakan luar negeri Kepulauan Solomon terhadap Taiwan.

Tulisan kedua adalah buku yang ditulis oleh Roland Seib dengan judul “*China In The South Pacific: No New Hegemon on the Horizon*” yang diterbitkan melalui

---

<sup>19</sup> Jhon Henderson, “China, Taiwan and the Changing Strategic Significance of Oceania”. In: *Revue Juridique Polynésienne*, vol. 1, no. 1, (2001) ;143-156.

<sup>20</sup> Henderson, China, Taiwan and the Changing Strategic Significance of Oceania.143-148



*Peace Research Institute Frankfurt (PRIF)* pada tahun 2009.<sup>21</sup> Tulisan tersebut mengkaji pengaruh yang dari Republik Rakyat Tiongkok yang semakin berkembang di Pasifik Selatan. Keterlibatan Tiongkok di kawasan ini dimotivasi oleh keinginan untuk menghalangi ekspansi diplomatik lebih lanjut oleh Taiwan dan solidaritas negara-negara kecil sekutunya dalam memberikan suara dalam organisasi internasional. Saat ini tujuan tersebut juga berkembang dalam masalah pasokan bahan mentah dan pengamanan pasar penjualan yang diperlukan untuk melanjutkan tingkat pertumbuhan Tiongkok yang lebih tinggi. Kemudian tulisan tersebut juga membahas tentang kebijakan luar negeri Tiongkok di Pasifik Selatan.

Sejak perekonomian Tiongkok mulai berubah ke arah yang lebih baik, Tiongkok kembali mengejar kebijakan pemulihan hubungan yang intensif dengan negara-negara Pasifik Selatan, yang tujuannya adalah untuk memaksa Taiwan keluar dari kawasan tersebut. Tiongkok menawarkan berbagai bantuan pembangunan untuk mendukung ekonomi lokal dan untuk meningkatkan standar hidup masyarakat. Satu-satunya syarat yang terkait dengan dukungan itu adalah pengakuan yang berkelanjutan terhadap prinsip “*One China*” dan pemutusan semua hubungan dengan Taiwan.<sup>22</sup> Selain itu tulisan tersebut memiliki perbedaan terhadap penelitian yang penulis lakukan diantaranya tulisan tersebut berfokus pada bagaimana perkembangan pengaruh Tiongkok di Pasifik Selatan dan menjelaskan tujuan Tiongkok di kawasan tersebut. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan bertujuan untuk melihat

---

<sup>21</sup> Roland Seib, *China in the South Pacific: No New Hegemon on the Horizon?*, *Pacific Review* (Peace Research Institute Frankfurt, 2009), <https://doi.org/10.1080/09512740902815292>.

<sup>22</sup> Roland Seib, *China in the South Pacific: Hegemon on the Horizon?*.6-8

bagaimana upaya yang dilakukan Tiongkok dalam mempengaruhi Kepulauan Solomon mengalihkan dukungan terhadap Taiwan.

Tulisan ketiga adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Paco Milhiet dalam jurnal *Asia Focus* melalui dengan judul “*China’s Ambition In The Pacific: Worldwide Geopolitical Issue*”.<sup>23</sup> Tulisan ini berkontribusi dalam penelitian untuk melihat upaya Tiongkok sebagai kekuatan ekonomi baru dalam menjalankan pengaruh fundamental di wilayah Pasifik. Tulisan ini mencoba menggambarkan bagaimana Tiongkok, sebagai kekuatan ekonomi besar baru, menjalankan pengaruh mendasar di Pasifik, sebuah kawasan yang kembali menjadi pusat masalah utama internasional pada awal abad ke-21. Dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 7% setiap tahun, Tiongkok menjadi salah satu pasar paling menarik di dunia. Dalam artikel ini juga disebutkan bahwa negara yang ingin bekerjasama dengan Tiongkok harus memutuskan dan meninggalkan hubungan formal yang terjalin dengan Taiwan termasuk dukungan diplomatik.

Persaingan antara Taiwan dan Tiongkok menggunakan *checkbook diplomacy* termasuk dikawasan Pasifik. *Checkbook diplomacy* merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan politik internasional secara terbuka menggunakan bantuan ekonomi dan investasi internasional antara dua negara untuk menyelesaikan perjanjian diplomatik. Selain itu artikel ini memiliki perbedaan terhadap penelitian yang penulis lakukan diantaranya artikel ini berfokus pada ambisi Tiongkok sebagai kekuatan ekonomi baru dalam mendapatkan dukungan di kawasan Pasifik. Sedangkan

---

<sup>23</sup> Paco Milhiet, “China ’ S Ambition in the Pacific :” (Institute Catholique De Paris, 2017).

penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada upaya Tiongkok dalam mengubah dukungan diplomatik yang diberikan Kepulauan Solomon terhadap Taiwan.

Tulisan keempat adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Denghua Zhang dalam jurnal *Security Challenges* melalui Institute for Regional Security dengan judul “*China’s Diplomacy in the Pacific: Interests, Means and Implications*”.<sup>24</sup> Tulisan ini berkontribusi dalam penelitian yang dilakukan untuk melihat sejarah awal masuknya pengaruh Tiongkok di kawasan Pasifik serta upaya Tiongkok dalam mengejar kepentingannya di kawasan tersebut. Tiongkok telah mengejar kepentingannya di kawasan Pasifik melalui tiga cara utama yaitu diplomasi kunjungan, pengaruh ekonomi, dan praktik non-interferensi.<sup>25</sup>

Kunjungan pertama Tiongkok dilakukan pada tahun 2006 ketika perdana menteri Tiongkok Wen Jiabao mengunjungi Fiji dan meresmikan forum kerjasama dan pembangunan ekonomi Cina-Pasifik. Kemudian pada tahun 2014 Presiden Tiongkok Xi Jinping mengunjungi Fiji dan mengumumkan keputusan untuk meningkatkan hubungan "ramah dan kooperatif" Tiongkok dengan negara-negara di Kepulauan Pasifik. Artikel ini juga menyebutkan bahwa sebelum Tiongkok dan Kepulauan Solomon memiliki hubungan diplomatik, Tiongkok terlebih dahulu telah menjadi mitra dagang utama Kepulauan Solomon. Selain itu artikel ini memiliki perbedaan terhadap penelitian yang penulis lakukan diantaranya artikel ini berfokus terhadap awal mula hubungan Tiongkok dan Kepulauan Pasifik. Sedangkan penelitian

---

<sup>24</sup> Denghua Zhang, “China’s Diplomacy in the Pacific: Interests, Means and Implications,” *Security Challenges* 13, no. 2 (2017), 32-53.

<sup>25</sup> Zhang, *China’s Diplomacy in the Pacific: Interests, Means and Implications*.5

yang dilakukan penulis berfokus pada upaya Tiongkok dalam mengubah dukungan diplomatik Kepulauan Solomon terhadap Taiwan.

Tulisan kelima berjudul “*China’s economic statecraft: turning wealth into power*” ditulis oleh James Reilly pada tahun 2013 yang diterbitkan di *Low Institute for International Policy*.<sup>26</sup> Pada artikel ini membahas tentang Tiongkok yang berusaha mengerahkan kekayaan ekonominya untuk mencapai tujuan kebijakan luar negerinya. Tiongkok memiliki kemampuan yang signifikan untuk menggunakan aset ekonomi negara yang sangat besar untuk memajukan agenda diplomatik mereka. Tiongkok memberikan pengaruh melalui timbal balik, di mana perilaku yang diinginkan dihargai sementara perilaku yang tidak diinginkan dihukum. Dalam kasus lain, Tiongkok memberikan manfaat tanpa syarat, dengan harapan bahwa keterlibatan ekonomi yang berkelanjutan pada akhirnya akan menghasilkan transformasi politik dan perubahan yang diinginkan dalam perilaku yang ditargetkan. Artikel ini menyebutkan bahwa Tiongkok berusaha menyebarkan aset ekonomi negaranya untuk menjalin hubungan diplomatik. Bantuan asing merupakan salah satu strategi yang dijalankan Tiongkok dalam menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain.

Dalam artikel ini juga disebutkan bahwa Tiongkok menggunakan kemampuan domestiknya berupa pasar dan kapasitas produksi untuk menarik investor Taiwan. Artikel ini berkontribusi dalam penelitian penulis dalam melihat bantuan-bantuan atau upaya yang dilakukan Tiongkok dalam menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara lain termasuk untuk menarik negara yang mendukung Taiwan agar beralih

---

<sup>26</sup> James Reilly, “China’s Economic Statecraft: Turning Wealth into Power,” *Low Institute For International Policy*, no. November (2013): 1–23.

untuk bekerjasama dengannya. Selain itu artikel ini memiliki perbedaan terhadap penelitian yang penulis lakukan diantaranya artikel ini berfokus pada strategi Tiongkok menyebarkan aset ekonomi negaranya untuk hubungan diplomatik dan membahas potensi ekonomi Tiongkok pada Australia. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada upaya Tiongkok dalam mengubah dukungan diplomatik Kepulauan Solomon terhadap Taiwan.

## 1.7 Kerangka Konseptual

### 1.7.1 *Economic Statecraft*

Dalam jurnal yang berjudul “*The Railroad Economic Belt: Grand Strategy, Economic Statecraft, and a New Type of International Relations*” yang ditulis oleh Karl Yan, *economic statecraft* didefinisikan sebagai praktik dimana tujuan non-ekonomi dapat dicapai melalui sarana ekonomi, seperti penggunaan alat ekonomi negara untuk mencapai tujuan geopolitik dan keamanan.<sup>27</sup> Dalam hubungan internasional, istilah *economic statecraft* digunakan untuk menggambarkan penggunaan alat ekonomi dan hubungan negara untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri dan digunakan secara sinonim dengan istilah 'diplomasi ekonomi'.<sup>28</sup> *Economic statecraft* melihat bahwa negara 'pengirim' berupaya mengubah perilaku negara 'target' dalam domain non-ekonomi dengan secara strategis memanipulasi hubungan ekonomi

---

<sup>27</sup> Karl Yan, “The Railroad Economic Belt: Grand Strategy, Economic Statecraft, and a New Type of International Relations,” *British Journal of Politics and International Relations* 23, no. 2 (2021): 262–79, <https://doi.org/10.1177/1369148120940938>.

<sup>28</sup> Aditi Lalbahadur, “Economic Statecraft in South Africa’s Regional Diplomacy,” *South African Journal of International Affairs* 23, no. 2 (2016): 135–149 <https://doi.org/10.1080/10220461.2016.1199970>.

antara keduanya melalui transaksi lintas yang mencakup keuangan dan hubungan komersial lainnya.<sup>29</sup>

David A. Baldwin dalam bukunya yang berjudul “*Economic Statecraft*” pada tahun 1985 menjelaskan bagaimana negara-negara kuat dapat menggunakan sarana ekonomi untuk mengejar tujuan kebijakan luar negeri mereka.<sup>30</sup> Baldwin juga menjelaskan bahwa terdapat 2 cara utama dalam mengejar tujuan dengan menggunakan *economic statecraft* yaitu *negative sanctions* (hukuman) dan *positive sanctions* (imbalan). Dalam instrumen *negative* negara pengirim biasanya melakukan upaya dengan mengganggu atau mengancam hubungan lintas batas yang ada sehingga negara target kehilangan manfaat berharga yang diciptakan oleh transaksi atau hubungan tersebut.<sup>31</sup> Sedangkan dalam instrumen *positive* negara pengirim menawarkan hubungan baru atau menawarkan bantuan yang bermanfaat di bidang ekonomi seperti investasi, perdagangan dan bantuan luar negeri lainnya.<sup>32</sup>

Menurut *economic liberal* keberhasilan dari *economic statecraft* tergantung dari besarnya hukuman atau imbalan yang diberikan oleh suatu negara.<sup>33</sup> Seperti yang dapat dilihat dari gambar berikut:

---

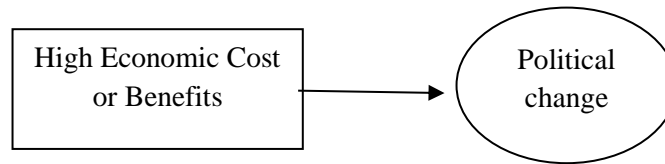
<sup>29</sup> Darren J. Lim, Victor A. Ferguson, and Rosa Bishop, “Chinese Outbound Tourism as an Instrument of Economic Statecraft,” *Journal of Contemporary China* 29, no. 126 (2020): 1–18, <https://doi.org/10.1080/10670564.2020.1744390>.

<sup>30</sup> Andreas Grimmel and Viktor Eszterhai, “The Belt and Road Initiative and the Development of China’s Economic Statecraft: European Attitudes and Responses,” *International Studies* 57, no. 3 (2020): 223–39, <https://doi.org/10.1177/0020881720925223>.

<sup>31</sup> Darren J. Lim, Victor A. Ferguson, and Rosa Bishop, “Chinese Outbound Tourism as an Instrument of Economic Statecraft,” *Journal of Contemporary China* 29, no. 126 (2020): 916–33, <https://doi.org/10.1080/10670564.2020.1744390.3>

<sup>32</sup> Lim, Ferguson, and Bishop, Chinese Outbound Tourism as an Instrument of Economic Statecraft. 3

<sup>33</sup> Jean-Marc F. Blanchard and Norrin M. Ripsman, “A Political Theory of Economic Statecraft,” *Foreign Policy Analysis* 4, no. 4 (2008): 371–98, <https://doi.org/10.4324/9780203098172-7>.



**Gambar 1. 1** *The Economic Liberal Model*

Sumber: Blanchard and Ripsman 2008: 374

Dalam instrumen *negative sanctions* (hukuman) Hufbauer et.al menyatakan bahwa “*senders should make their sanctions as costly as possible to the target*”.<sup>34</sup> Sederhananya sanksi dengan biaya yang besar akan memiliki peluang keberhasilan yang besar untuk negara target. Sedangkan dalam instrumen *positive sanctions* (imbalan) Hufbauer et.al menyatakan bahwa “*more valuable incentives are more likely to achieve policy goals*”. Kalimat tersebut menunjukkan bahwa semakin berharga imbalan yang diberikan kepada negara target maka akan semakin besar kemungkinan negara pengirim untuk mencapai tujuannya.

Michael Mastanduno dalam jurnalnya yang berjudul “*Economic Statecraft, Interdependence, and National Security: Agenda For Research*” memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing instrumen sebagai berikut:<sup>35</sup>

1. *Positive Sanctions* (imbalan), dalam pemberian imbalan negara dapat melakukannya melalui 2 hal berikut:

<sup>34</sup> Jean-Marc F. Blanchard and Norrin M. Ripsman, *A Political Theory of Economic Statecraft*.374

<sup>35</sup> Michael Mastanduno, “Economic Statecraft, Interdependence, and National Security: Agendas for Research,” *Agricultural History Review* 9, no. 1–2 (1999): 37–41, <https://doi.org/10.1080/09636419908429402>.

- a) *Carrots or Specific Positive Linkage* yaitu dengan melibatkan janji ekonomi yang dapat membuat negara target mengubah kebijakan domestik atau kebijakan luar negeri tertentu negara target
- b) *General positive Linkage or Long-Term Engagement* yaitu melibatkan upaya jangka panjang dengan menggunakan aliran manfaat ekonomi berkelanjutan yang pada akhirnya akan menghasilkan transformasi politik dan perubahan yang diinginkan dalam perilaku sasaran.

Dalam hal ini imbalan ekonomi secara mandiri dapat mencapai tujuan politik yang vital dengan memberikan imbalan ekonomi yang dapat mengubah keseimbangan kekuatan dalam suatu negara. Untuk menawarkan sebuah hubungan yang baru biasanya negara pengirim menggunakan instrumen *positive sanctions* atau memberikan sebuah imbalan yang akan memberikan manfaat ke negara target.<sup>36</sup>

2. *Negative sanctions* (hukuman), menurut Mastanduno pemberian hukuman akan lebih efektif dengan melibatkan penerapan *economic pressure* (tekanan ekonomi). Semakin banyak kerusakan yang dapat ditimbulkan pada ekonomi target, semakin besar kemungkinan pemerintah target akan menyerah, baik dengan sendirinya atau sebagai akibat dari tekanan politik yang dipaksakan. Sederhananya sanksi menunjukkan bahwa lebih banyak kesengsaraan ekonomi akan lebih baik bagi negara pengirim untuk mencapai tujuannya. Untuk menerapkan sanksi ekonomi secara efektif, negara harus memaksakan rasa sakit ekonomi yang cukup pada target yang tepat.

---

<sup>36</sup> Lim, Ferguson, and Bishop, *Chinese Outbound Tourism as an Instrument of Economic Statecraft*.3



Dapat disimpulkan bahwa *economic statecraft* menjelaskan bagaimana negara menggunakan kekuatan ekonominya sebagai upaya mempengaruhi negara lain untuk meyakinkan pemimpin negara tersebut merubah kebijakannya. Taksonomi dijelaskan oleh Michael Mastundo terkait jenis *positive sanctions* dan *negative sanctions* yang dapat dilakukan negara menjelaskan lebih rinci upaya yang dapat dilakukan melalui *economic statecraft*. Menggunakan konsep ini terlihat upaya-upaya yang dilakukan Tiongkok dalam mendapatkan dukungan Kepulauan Solomon baik melalui tekanan ekonomi, janji-janji ekonomi maupun keterikatan hubungan ekonomi jangka panjang yang dibuat oleh Tiongkok.

### **1.8 Metode Penelitian**

Metode atau metodologi adalah seperangkat prosedur, proses, dan prinsip tentang bagaimana suatu pengetahuan mengenai suatu penelitian diperoleh yang digunakan oleh seorang peneliti dalam menemukan jawaban.<sup>37</sup> Sedangkan penelitian memiliki definisi yaitu kegiatan pencarian kebenaran yang terencana secara sistematis dan dilakukan berdasarkan metode ilmiah. Umumnya penelitian memiliki dua komponen khusus dalam substansinya yaitu observasi empiris dan logika.<sup>38</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa metode penelitian merupakan seperangkat prosedur yang terencana, sistematis, dan dilandasi metode ilmiah untuk menemukan kebenaran tentang sesuatu.

---

<sup>37</sup> Deddy Mulyana, "Methodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, 2001

<sup>38</sup> Maria S.W Sumarjono, Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian (Yogyakarta; 1989) 27

### **1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini pendekatan yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang serta tindakan-tindakan dalam mencari kebenaran.<sup>39</sup> Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif yang mana penulis akan mendeskripsikan fakta dan data yang didapatkan dan disertai dengan penjelasan terkait hal tersebut. Deskripsi yang akan terlihat pada penelitian ini adalah upaya dari Tiongkok dalam mengubah dukungan diplomatik Kepulauan Solomon terhadap Taiwan.

### **1.8.2 Batasan Penelitian**

Adapun tujuan dari pemberian batasan masalah adalah untuk membantu mengarahkan penelitian agar lebih spesifik dan jelas sehingga dapat difokuskan kepada pokok permasalahan. Penelitian ini dibatasi pada rentang tahun 2014 - 2019. Adapun tahun 2014 dipilih karena terdapat pernyataan dari Perdana Menteri Kepulauan Solomon terkait rencana bergabungnya Kepulauan Solomon ke Tiongkok karena meningkatnya ikatan ekonomi dengan Tiongkok. Kemudian dibatasi pada tahun 2019 dikarenakan pada tahun ini Kepulauan Solomon resmi mengalihkan dukungan diplomatiknya dari Taiwan ke Tiongkok.

---

<sup>39</sup> Prof.Dr.Erli Barlian,MS, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Padang: Sukabina, 2016).

### 1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Berdasarkan definisi, unit analisis merupakan objek yang perilakunya akan dijelaskan, dideskripsikan dan dianalisis.<sup>40</sup> Berdasarkan hal tersebut unit analisis pada penelitian ini adalah Tiongkok, terkait upayanya mendapatkan dukungan diplomatik Kepulauan Solomon. Sedangkan unit eksplanasi merupakan objek yang mempengaruhi perilaku unit analisis yang akan digunakan. Adapun unit eksplanasi pada penelitian adalah Kepulauan Solomon, terkait dukungan diplomatik yang diberikannya. Selain unit analisis dan unit eksplanasi, pada penelitian ini terdapat level analisis yang mana penelitian ini berada pada level analisis di tingkat negara, karena membahas mengenai upaya yang dilakukan Tiongkok.

### 1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam mendapatkan data untuk penelitian ini, peneliti menggunakan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data. Penelitian ini akan menggunakan sumber data sekunder berupa artikel jurnal ilmiah yang telah mengkaji mengenai kerjasama yang telah dilakukan Tiongkok dan Kepulauan Solomon dalam rentang waktu 2014 - 2019 dan report berupa kumpulan berita dari media massa online terkait hubungan kerjasama Tiongkok dan Kepulauan Solomon. Data sekunder diperoleh melalui library research seperti artikel jurnal internasional yang ditulis oleh Jhon Anderson yang berjudul *China, Taiwan And The Changing Strategic Significance Of Oceania*. Kemudian artikel jurnal yang ditulis oleh Paco Milhiet yang berjudul *China's Ambition In The Pacific: Worldwide Geopolitical Issues*. Artikel jurnal yang ditulis

---

<sup>40</sup> Mohtar Mas'oed, "Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi", LP3ES, 1990, hal. 108.

oleh Darren J.Lim, yang berjudul *Chinese Outbound Tourism as an Instrument of Economic Statecraft*.

Penelitian ini juga menggunakan artikel jurnal nasional untuk membantu dalam memperoleh informasi terkait fenomena Kepulauan Solomon dan Taiwan, seperti yang ditulis oleh Adinda Normala Putri dengan judul *Persaingan Pengaruh di Pasifik Selatan: Pengalihan Dukungan Diplomatik Kepulauan Solomon dari Taiwan ke Tiongkok*, penulis juga menggunakan data dari berbagai media seperti berita (Rappler, Reuters), laporan resmi, discussion paper, dan data-data penelitian yang dikeluarkan oleh beberapa universitas seperti Universitas Indonesia. Penelitian ini menggunakan beberapa kata kunci untuk menjelaskan terkait upaya Tiongkok dalam peralihan dukungan diplomatik Kepulauan Solomon. Data-data yang dikumpulkan pada penelitian ini akan terkait pada awal mula Tiongkok memberikan bantuan pada Kepulauan Solomon. Data tersebut didapatkan dari pernyataan surat kabar terpercaya seperti *The Diplomat*, *The guardian* BCC, CNN dan lainnya. Kata kunci yang penulis gunakan dalam mencari sumber data adalah Kepulauan Solomon, Pasifik Selatan, Rivalitas, Taiwan, Tiongkok.

### **1.8.5 Teknik Analisis Data**

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif di mana peneliti akan mengolah data yang dianalisis menggunakan studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan pada

penelitian ini berangkat dari pemikiran Miles dan Huberman yang menjelaskan tahapan analisis data sebagai berikut.<sup>41</sup>

### 1. Reduksi data

Pada tahapan ini, data yang sudah dikumpulkan sebelumnya kemudian akan direduksi dengan cara memilah dan memilih data yang sesuai dengan penelitian. Reduksi data meliputi; meringkas data, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus. Dalam penelitian ini, reduksi data akan dilakukan dengan menelusuri tema untuk mengumpulkan data dengan menggunakan kata kunci Kepulauan Solomon, Pasifik Selatan, Rivalitas, Taiwan, Tiongkok agar dapat memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data yang diperlukan. Data yang diperoleh akan dikelompokkan ke dalam beberapa bagian untuk melihat data yang dibutuhkan dan data yang tidak diperlukan dalam penelitian.

### 2. Penyajian data

Pada tahapan ini data dan informasi yang sudah didapat kemudian akan dilakukan penyusunan sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan yang dapat berupa teks naratif, maupun matrik, grafik, jaringan dan bagan. Dalam penelitian ini, data-data yang telah dikumpulkan melalui sumber sekunder terkait upaya Tiongkok akan penulis sajikan berdasarkan kategori dimensi *economic statecraft* Michael Mastanduno melalui uraian atau teks yang bersifat naratif.

---

<sup>41</sup> Miles dan Huberman, "Analisis Data Kualitatif" dalam Fachrudin, "Teknik Analisis Data Kualitatif," UIN Syarif Hidayatullah. (2013): 5.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Tahapan ini merupakan proses akhir dalam analisis data yang mana mencakup kesimpulan dari seluruh data yang diperoleh. Kemudian data tersebut akan memperkuat tulisan dan membantu dalam menjawab pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan akan dimudahkan dengan adanya pengkategorian data yang sudah disajikan berdasarkan taksonomi dari Michael Mastanduno sehingga terlihat jelas upaya-upaya yang dilakukan Tiongkok dalam mengalihkan dukungan diplomatik Kepulauan Solomon.

## 1.9. Sistematika Penulisan

### Bab I Pendahuluan

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, temuan dari studi pustaka, penjabaran kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian, metodologi penelitian meliputi jenis penelitian, batasan masalah unit dan tingkat analisis, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan. Hal ini menjadi landasan dan gambaran besar dari penelitian ini sehingga pembaca akan mendapatkan pengetahuan dasar terkait penelitian ini.

### Bab II Rivalitas Tiongkok dan Taiwan di Kawasan Pasifik Selatan

Pada bab ini berisi penjelasan mengenai beberapa hal, mulai dari hubungan awal Taiwan dan Tiongkok yang menyebabkan terjadinya

rivalitas antara kedua negara tersebut, penjelasan terkait Taiwan dan Tiongkok yang menjadikan kawasan pasifik selatan sebagai arena diplomasi kedua negara, serta aktivitas rivalitas diplomatik kedua negara tersebut di kawasan pasifik selatan.

### **Bab III           Keentingan Tiongkok Di Kepulauan Solomon**

Dalam bab ini akan menjelaskan bagaimana kepentingan Tiongkok di kawasan Pasifik Selatan yang mana pembahasan ini akan memberikan penulis gambaran terkait kepentingannya pada Kepulauan Solomon.

### **BAB IV           Upaya Tiongkok Dalam Mengubah Dukungan Diplomatik Kepulauan Solomon**

Pada bab IV ini membahas mengenai upaya Tiongkok dalam mengubah dukungan diplomatik Kepulauan Solomon terhadap Taiwan menggunakan kerangka konsep yang telah di pilih oleh penulis. Penulis akan menjabarkan upaya Tiongkok melalui *positive sanctions* dan *negative sanctions* yaitu melalui bantuan-bantuan ekonomi yang diberikan oleh Tiongkok kepada Kepulauan Solomon.

### **Bab V            Penutup**

Bab V merupakan bab terakhir pada penelitian ini di mana pada bab ini akan memaparkan kesimpulan dari seluruh pembahasan dalam bab sebelumnya dan juga terdapat saran dari peneliti untuk para pihak yang

terlibat dan bagi peneliti selanjutnya untuk melanjutkan penelitian ini agar lebih baik.

